KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penguatan kelembagaan DPR terus ditingkatkan
Tanggal : Rabu, 20 Februari 2013
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 7

Penguatan Kelembagaan DPR Terus Ditingkatkan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berupaya meningkatkan kelembagaannya untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki akuntabilitas. Penguatan kinerja DPR dapat dilakukan dengan meningkatkan peran, kapasitas, dan kompetensi, anggota DPR. Dalam sebuah diskusi, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menyebutkan kepemimpinan DPR sudah sepakat melakukan pembenahan-pembenahan mendasar untuk menegakkan citra DPR.

"Kami akan melakukan beberapa hal untuk pembenahan demi menegakkan citra DPR yang selama ini terpuruk. Untuk tahap awal, kami sudah melakukan sejumlah pelatihan. Kebetulan kami mendapatkan tawaran dari lembaga yang melaksanakan itu untuk memberikan pelatihan tersebut secara gratis. Dengan demikian maka kualitas anggota DPR ke depan diharapkan dapat lebih baik," ujar Marzuki.

Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa program penguatan kelembagaan DPR RI dalam sistem ketatanegaraan yang diharapkan terealisasi hingga tahun 2014. "Program tersebut diantaranya penguatan kehumasan, kemandirian pengelolaan anggaran, pengembangan prasarana utama, perpustakaan parlemen, penguatan sarana representasi, dan pengembangan *e-parliament*," ujarnya.

Dalam perkembangannya, DPR mengalami proses penyesuaian sesuai kebutuhan zaman. Sebelum era reformasi, DPR kerap disebut sebagai lembaga stempel pemerintah. "Tapi sejak era reformasi tahun 1998-1999, terjadi perubahan konstitusi yang membuat kekuasaan dan fungsi DPR sangat besar. Untuk itu kami memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat guna menunjang tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat," tambahnya.

DPR, menurutnya, menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam menyusun undang-undang (legislasi), *budget* atau anggaran, melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah hingga pemberian pertimbangan atas pengangkatan ataupun penerimaan pejabat publik.

"Karena itu demi memperkuat kelembagaan DPR sebagai pilar demokrasi, kami mengupayakan memperkuat kelembagaan melalui pembentukan badan fungsional keahlian. Dari sisi pengawasan internal pun dibentuk unit pengawasan internal yang bertanggungjawab langsung kepada pimpinan DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan secara administratif dikoordinasikan Sekretaris jenderal (Sekjen) DPR RI," jelasnya.

Untuk meningkatkan kinerja anggota dewan, BURT mendesak untuk segera dibentuknya Badan Fungsional/Keahlian yang beranggotakan para pakar di semua bidang. Badan ini akan membantu anggota dewan dalam bekerja, terutama menyangkut hal-hal teknis suatu permasalahan.

"Mereka akan menyelidiki masalah dan hal teknis satu persoalan. Selama ini, kita juga ikut berdiskusi pada hal teknis, bahkan sampai masalah tata bahasa perundang-undangan juga dibahas dalam rapat, sehingga rapat suka molor. Padahal harus kita akui, anggota dewan memiliki kompetensi terbatas pada beberapa bidang saja, sehingga diperlukan bantuan para pakar untuk memberikan pertimbangan sebelum menentukan kebijakan," ujar Wakil Ketua BURT dari PKS, Mohammad Syahfan B Sampurno.

Tak bisa dipungkiri, DPR sebagai representasi perwakilan rakyat merupakan hasil pertarungan politik lewat pemilu. Namun di sisi lain DPR juga punya tugas dan kewenangan legislasi. Inilah yang kadangkala tidak berjalan sinergis.

Penguatan kelembagaan DPR tak hanya dilakukan dengan penguatan kekuatan politik, tapi juga harus dengan penguatan kinerja yang mampu memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. "Idealnya, setiap anggota dewan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamantkan oleh undang-undang. Untuk itu kami butuh kelengkapan dan pendukung untuk memaksimalkan fungsi kami," jelasnya.

Badan Fungsional/Keahlian menjadi salah satu program yang terus didorong oleh BURT DPR. Badan ini akan membantu kinerja anggota dewan untuk mencapai hasil yang maksimal. "Jika sekarang ada tudingan DPR hanya sedikit menghasilkan undang-undang, karena memang kami belum memiliki BFK. Kalau sudah ada BFK, badan itu yang nantinya bekerja menyelidiki permasalahan setiap bidang yang akan dibuat undang-undangnya," jelasnya.

Pembentukan BFK, saat ini masih dalam penggodokan bersama pemerintah. Diharapkan tahun ini sudah ada formula yang disepakati dan bisa dibentuk secepatnya.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, DPR RI harus mendapat tempat yang baik di mata publik. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 20A Ayat (1), DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Disamping itu, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, seperti yang diatur dalam undang-undang.

Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas, termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang diajukan untuk kesejahteraan rakyat.

Kedudukan DPR dalam penetapan anggaran ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan presiden, karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Sedangkan fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh presiden. Penegasan fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR dalam UUD 1945 akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat.

Sejauh ini, amanat konstitusional DPR ditindaklanjuti melalui sederetan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), dan Peraturan DPR No 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib. Dalam UU MD3 pada Pasal 69 jelas disebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi; fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. Kerangka representasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban seorang anggota dewan sebagaimana diamanatkan dalam UU MD 3 Pasal 79.

Pelaksana ketiga fungsi DPR sampai saat ini telah berjalan cukup efektif melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja komisi serta kunjungan kerja spesifik komisi. Setiap masalah yang ditemui dalam kunjungan kerja komisi maupun dalam kunjungan kerja spesifik selalu ditindaklanjuti oleh komisi bersama pemerintah melalui mekanisme rapat-rapat. Bahkan apabila dipandang perlu, dilakukan pendalaman, komisi dapat membentuk panitia kerja (Panja).

Selain itu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR juga terus melakukan konsolidasi kepada semua pihak agar terwujud kelembagaan DPR yang ideal. Salah satunya adalah dengan mengadakan sejumlah *workshop* dan pelatihan, seperti *workshop* Penguatan Kinerja Kelembagaan DPR RI melalui Peningkatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPR RI.
[AS-SP]



DOK. PEMBERITAAN DPR

Wakil Ketua BURT Mohammad Syahfan B Sampurno didampingi Wakil Ketua lainnya Indrawati Sukadis saat memimpin rapat BURT.